

**PEMBATALAN PERATURAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI



Oleh:

MONA

NBI : 1311501799

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PEMBATALAN PERATURAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI



Oleh:

MONA

NIM: 1311501799

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PEMBATALAN PERATURAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

MONA

NIM: 1311501799

Dosen Pembimbing:


Syofyan Hadi, S.H., M.H.

NIP: 20310130611

Tanggal : 28 Januari 2019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2019

**PEMBATALAN PERATURAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014**

Oleh:

MONA

NBI: 1311501799

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 21 Januari 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 046/K/FH/I/2019

Tanggal : 18 Januari 2018

TIM PENGUJI:

Ketua : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NIP : 20310930349

Sekretaris : Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.H.
NIP : 20310900210

Anggota : Syofyan Hadi, S.H., M.H.
NIP : 20310130611

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mona
NIM : 1311501799
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat dengan judul:

"Pembatalan Peraturan Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014"

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan "**Duplikasi**" dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 14 Januari 2019



Hormat saya,

Mona

NIM.1311501799

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : MONA

NIM : 1311501799

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

Pembatalan Peraturan Desa Menurut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal 30 Januari 2019

Yang menyatakan,



Mona

**PEMBATALAN PERATURAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI



Oleh:

**MONA
NIM: 1311501799**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PEMBATALAN PERATURAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI



Oleh:

MONA
NIM: 1311501799

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PEMBATALAN PERATURAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

**MONA
NIM: 1311501799**

Dosen Pembimbing:

**Syofyan Hadi, S.H., M.H.
NIP: 20310130611**

Tanggal : 28 Januari 2019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PEMBATALAN PERATURAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014**

Oleh:

MONA
NBI: 1311501799

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 21 Januari 2018
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 046/K/FH/I/2019
Tanggal : 18 Januari 2018**

TIM PENGUJI:

Ketua : **H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**
NIP : 20310930349

Sekretaris : **Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.H.**
NIP : 20310900210

Anggota : **Syofyan Hadi, S.H., M.H.**
NIP : 20310130611

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H
NPP : 20310860065

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mona
NIM : 1311501799
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

“Pembatalan Peraturan Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014”

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 14 Januari 2019

Hormat saya,

Mona
NIM.1311501799

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : MONA

NIM : 1311501799

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**PEMBATALAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal 30 Januari 2019

Yang menyatakan,

Mona

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas setiap rahmat, hidayah dan anugerah yang diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Pembatalan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014". Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di program studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada:

1. Syofyan Hadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Affifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Surabaya, 14 Januari 2019

Penulis,

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut bagaimana kedudukan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan saat ini dan bagaimana mekanisme pembatalan terhadap peraturan desa. Isu hukum dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan dan pertentangan norma. Oleh karenanya terhadap isu hukum tersebut, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah melalui penafsiran dan harmonisasi, dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penulisan ini bahwa suatu peraturan juga termasuk peraturan perundang-undangan apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut meskipun tidak ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan karena peraturan desa dibentuk berdasarkan kewenangan. Terkait peraturan yang mengatur pembatalan peraturan desa melalui *executive review* perlu dilakukan perubahan karena hal tersebut telah bertentangan dengan konstitusi bahwa peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga pembatalan peraturan desa dilakukan melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung.

Kata kunci: Peraturan Desa, judicial review, Mahkamah Agung.

ABSTRACT

This research is the normative legal research being done to get an idea of how further regulation of the village's position in the hierarchy of the current legislation and how the cancellation mechanism against the regulation of the village. The legal issue in this research is the vagueness and contradiction norm. Therefore against the law issues, legal materials analysis technique used is through interpretation and harmonization, using deductive logic. The result was that writing a rule also included legislation when ordered by the higher legislation or established on the basis of the authority. So based on these provisions though not asserted in article 7 paragraph (1) of the regulation of the village is the village regulations because the regulations were formed based on authority. Related regulations governing cancellation rules of the village through the executive review of the need for change because it was contrary to the Constitution that the regulation of the village is the laws and regulations under the Act, so the village regulations cancellation done through judicial review to the Supreme Court.

Keywords: regulation, judicial review, the Supreme Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Jenis Penelitian	6
1.5.2. Metode Pendekatan	6
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Negara Kesatuan	12
2.2. Teori Tentang Desa dan Otonomi Desa	16
2.3. Konsep Peraturan Perundang-Undangan.....	20
2.4. Model Pengujian Peraturan Perundang-undangan	25
2.5. Teori Jenjang Norma	30
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Kedudukan Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	37
3.1.1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	40
a. Tap MPR No. III/MPR/2000	40
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004	43
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011	46
3.1.2. Kedudukan Peraturan Desa	49
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979	49
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999	50

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004	51
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014	53
3.2. Pembatalan Peraturan Desa	56
3.2.1. Pembatalan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	56
3.2.2. Pembatalan Peraturan Desa	60
BAB IV PENUTUP	
4.1. Simpulan.....	70
4.2. Saran.....	70
DAFTAR BACAAN	71